BAB I
PENDAHULUAN

Bab I merupakan pendahuluan yang merupakan *framework* dari penyusunan laporan ini. Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran. Dibahas pula ruang lingkupnya yang meliputi ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi, serta dipaparkan pula metodologi penelitian dalam penyusunan laporan ini dan kerangka pemikiran yang merupakan alur pikir penyusunan laporan serta sistematika pembahasan.

1.1 Latar Belakang

Masalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan saat ini merupakan salah satu masalah yang sulit untuk dipecahkan di kota-kota besar. Masalah RTH terjadi karena adanya kebutuhan ruang untuk menampung penduduk dan aktivitasnya, sehingga ruang hijau tersebut cenderung mengalami konversi guna lahan menjadi kawasan terbangun yang dilakukan tanpa memperhatikan keberadaan lingkungan sekitar. Sebagian besar permukaannya, terutama di pusat kota, tertutup oleh jalan, bangunan dan lain-lain dengan karakter yang sangat kompleks dan berbeda dengan karakter ruang terbuka hijau. Pada umumnya dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas lingkungan hidup.

Menurunnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik yang ada di perkotaan, baik berupa ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka non-hijau telah mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti seringnya terjadi banjir di perkotaan, tingginya polusi udara, dan meningkatnya kerawanan sosial (kriminalitas dan krisis sosial), menurunnya produktivitas masyarakat akibat stress karena terbatasnya ruang publik yang tersedia untuk interaksi sosial. Dengan kata lain, keberadaan RTH dapat mengendalikan dan memelihara integritas dan kualitas lingkungan, karena Ruang Terbuka Hijau mempunyai tujuan dan manfaat yang besar bagi keseimbangan, kelangsungan, kesehatan, kelestarian, dan peningkatan kualitas lingkungan itu sendiri.

Kebutuhan RTH di suatu perkotaan diharuskan mencapai 30% dari luas wilayahnya (Undang-Undang No. 26 Tahun 2007) yang terdiri atas 10% RTH privat dan 20% RTH publik. Ketercapaian RTH sebesar 30% dapat mengatasi dampak-dampak negatif yang akan muncul di wilayahnya. Akan tetapi, Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini memiliki ruang terbangun 67%, RTH 10% (tepatnya 9,97%), sisa lahan yang tengah diperebutkan untuk menjadi RTH atau kawasan komersial 23%. Saat ini luas RTH di DKI hanya seluas 6,240 Ha (9,6%) dari target 13,94%.

Dalam Rencana Induk Jakarta 1965-1985 target RTH adalah 37,2%. Namun dalam Perda No. 5 Tahun 1984, Rencana Umum Tata Ruang Jakarta 1985-2005, alokasi RTH menyusut menjadi 25,85%. Akan tetapi, dengan adanya revisi Perda No. 5 Tahun 1984 menjadi Perda No. 6 Tahun 1999 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2000-2010, target RTH hanya disisakan seluas 13,4%. Sedangkan untuk saat ini RTH Jakarta tinggal 9,6% (6,240 Ha) dari luas Provinsi DKI Jakarta yang sebesar 66.152 Ha (*Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, 2008*). Artinya, selama 25 tahun (1985-2010), RTH Jakarta terkikis seluas 28,2 persen. Hal tersebut jelas terlihat bahwa target luasan RTH dalam Tata Ruang Jakarta terus dikurangi. Sebagai bagian dari legalisasi perubahan-perubahan itu, dari 37,2 persen dalam Rencana Induk 1965-1985 hingga 13,94 persen dalam RTRW 2000-2010. Hal tersebut disebabkan oleh RTH (Ruang Terbuka Hijau) di Provinsi DKI Jakarta yang telah banyak yang beralih fungsi menjadi bangunan apartemen, mall, hotel, SPBU, perumahan mewah, lapangan golf, pusat industri, serta dibarengi dengan jumlah kendaraan yang semakin meningkat. Keadaan tersebut menggambarkan bahwa RTH di Provinsi DKI Jakarta belum sesuai dengan standar, baik secara kualitas maupun kuantitas suatu wilayah, sehingga di butuhkan prioritas pengembangan RTH agar kebutuhan RTH yang kurang dari standar dapat sama dengan standar yang ada.

Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan salah satu daerah yang rawan akan terjadinya banjir. Dimana pada Tahun 2010, Kota Administrasi Jakarta Timur yang terjadi banjir adalah dua kecamatan, yaitu Kecamatan Jatinegara (Kelurahan Kampung Melayu dan Bidara Cina) dan Kecamatan Kramat Jati (Kelurahan Cawang). (*Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta*

Timur, 2010). Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan wilayah yang paling luas diantara wilayah jakarta yang lain yaitu 18.776 Ha yang memiliki 10 kecamatan. Hal tersebut berpengaruh terhadap jumlah penduduk yang cukup besar yaitu 2.195.300 jiwa dibandingkan dengan bagian wilayah di Provinsi Jakarta lainnya sehingga memiliki kepadatan penduduk yang tinggi yaitu 117 Ha. Dengan kondisi tersebut, mengindikasikan tingginya aktivitas kegiatan yang dilakukan di Jakarta Timur, mengingat Jakarta Timur sebagai pusat perdagangan, industri, dan jasa sehingga mempengaruhi tingginya guna lahan yang ada. Hal tersebut berimbas kepada semakin berkurangnya dan beralihnya fungsi lahan RTH untuk pembangunan fisik, itu terlihat dari penggunaan lahan untuk RTH Kota Administrasi Jakarta Timur saat ini baru mencapai 10,81 Ha (*Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007*). Sedangkan untuk luas RTH Kota Administrasi Jakarta Timur mencapai 2.040,67 Ha (10,86%) (*Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010*).

Dengan kondisi tersebut, maka RTH di Kota Administrasi Jakarta Timur harus dipertahankan agar tidak terjadinya penurunan dan perlu ditambah keberadaan RTHnya agar dapat mengurangi dampak terhadap lingkungan perkotaan. Dengan demikian, melihat kondisi yang ada saat ini, maka penelitian mengenai "Identifikasi Kecamatan dan Jenis RTH yang diprioritaskan untuk Pengembangan RTH di Kota Administrasi Jakarta Timur" perlu dilakukan untuk mengetahui kecamatan yang masih dapat dijadikan prioritas untuk pengembangan RTH di Kota Administrasi Jakarta Timur serta jenis RTH apa yang dapat dikembangkan untuk kecamatan tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan persoalan yang terjadi mengenai RTH di Kota Administrasi Jakarta Timur. Maka pertanyaan yang harus dijawab untuk menyelesaikan masalah tersebut dijabarkan dalam perumasan masalah. Perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana karakteristik RTH di Kota Administrasi Jakarta Timur?

b. Apa saja potensi dan permasalahan RTH di Kota Administrasi Jakarta Timur berdasarkan aspek fisik?
c. Kecamatan mana saja yang bisa dijadikan prioritas untuk pengembangan RTH di Kota Administrasi Jakarta Timur?
d. Jenis RTH apa yang dapat diprioritaskan untuk kecamatan yang menjadi prioritas pengembangan RTH di Kota Administrasi Jakarta Timur?

1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kecamatan dan jenis RTH yang bisa dijadikan prioritas untuk pengembangan RTH di Kota Administrasi Jakarta Timur. Hal tersebut dilakukan untuk upaya penambahan RTH di Kota Administrasi Jakarta Timur.

Adapun sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan studi yang diharapkan adalah:

1. Teridentifikasinya karakteristik RTH di Kota Administrasi Jakarta Timur.
2. Teridentifikasinya potensi dan permasalahan RTH di Kota Administrasi Jakarta Timur berdasarkan aspek fisik.
3. Teridentifikasinya kecamatan yang dapat dijadikan prioritas untuk pengembangan RTH di Kota Administasi Jakarta Timur.
4. Teridentifikasinya jenis RTH yang dapat diprioritaskan untuk kecamatan yang menjadi prioritas pengembangan RTH di Kota Administrasi Jakarta Timur.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pembahasan ini terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Ruang lingkup wilayah menjelaskan mengenai cakupan wilayah yang menjadi kajian studi, sedangkan lingkup materi menjelaskan mengenai materi-materi yang terkait dengan kajian studi.

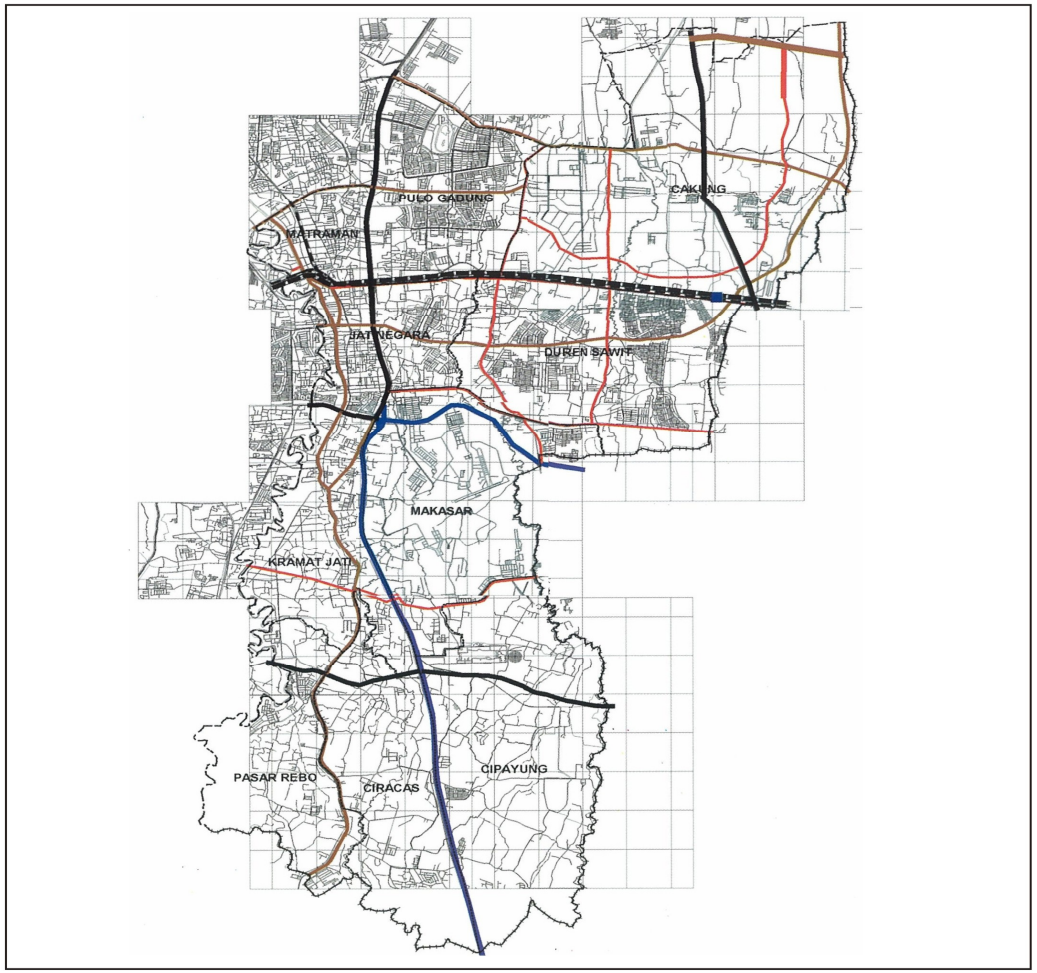
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini adalah di Kota Administrasi Jakarta Timur dengan 10 kecamatan yaitu Kecamatan Pasar Rebo, Kecamatan Ciracas, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Makasar, Kecamatan Kramat Jati, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Duren

Sawit, Kecamatan Cakung, Kecamatan Pulogadung, dan Kecamatan Matraman. Lingkup wilayahnya dapat dilihat pada **Gambar 1.1**.

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Lingkup materi yang dibahas dalam penelitian ini adalah lebih ditekankan pada kecamatan yang menjadi prioritas untuk dijadikan pengembangan RTH di Kota Administrasi Jakarta Timur. Selain kecamatan yang diprioritaskan, jenis RTH juga diprioritaskan. Materi yang dibahas dalam penelitian ini adalah karakteristik RTH di Kota Administrasi Jakarta Timur yang meliputi jenis RTH taman, jalur hijau jalan, tepian air, taman rekreasi, taman olahraga, pertanian, hutan kota, dan taman pemakaman umum. Pembahasan mengenai jenis RTH yang dijelaskan hanya pada batasan RTH yang ada di Kota Administrasi Jakarta Timur, karena jika mengaca pada Permen PU Nomor 5/PRT/M2008 dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 Kota Administrasi Jakarta Timur tidak memiliki jenis RTH yang sesuai dengan acuan tersebut. Selain itu, mengidentifikasi potensi dan permasalahan RTH disetiap kecamatan berdasarkan aspek fisik yang meliputi luasan, sebaran, kualitas, dan kuantitas. Dalam menentukan prioritas kecamatan, dilihat berdasarkan standar yang ada yaitu mengenai materi penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk menurut Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum Tahun 2008.



PETA BATAS ADMINISTRASI WILAYAH JAKARTA TIMUR

Legenda

- Jalan Tol
- Jalan Arteri Primer Dengan Tol
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Rel Kereta Api
- Batas Wilayah Kecamatan
- Batas Wilayah Kota Administrasi
- Batas Wilayah Provinsi



U

Tanpa Skala

JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
BANDUNG
2010

Gambar 1.1
Peta Batas Administrasi Jakarta Timur

1.5 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian terdiri dari metode pengumpulan data dan metode analisis. Penjelasan mengenai metodologi penelitian dapat dilihat sebagai berikut.

1.5.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari metode pengumpulan data primer dan metode pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data primer merupakan data-data yang langsung diperoleh dilapangan yaitu dengan melihat kondisi eksisting RTH yang ada di Kota Administrasi Jakarta Timur, sehingga diperoleh gambaran mengenai potensi dan permasalahan yang ada. Selain itu, dilakukan wawancara dengan instansi-instansi yang terkait dan mengabadikan RTH di Kota Administrasi Jakarta Timur untuk setiap tipologi RTH. Sedangkan pengumpulan data sekunder diperoleh dari hasil survey sekunder yaitu dengan melakukan studi literatur dan survey kunjungan ke instansi-instansi yang terkait guna meminta data/dokumen berupa *softcopy* ataupun *hardcopy* yang berkaitan dengan RTH. Dimana instansi-instansi yang terkait tersebut adalah Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta, Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Sudin Pertamanan Kota Administrasi Jakarat Timur, Sudin Pertanian dan Kehutanan Kota Administrasi Jakarat Timur, Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, dan kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Administrasi Jakarat Timur.

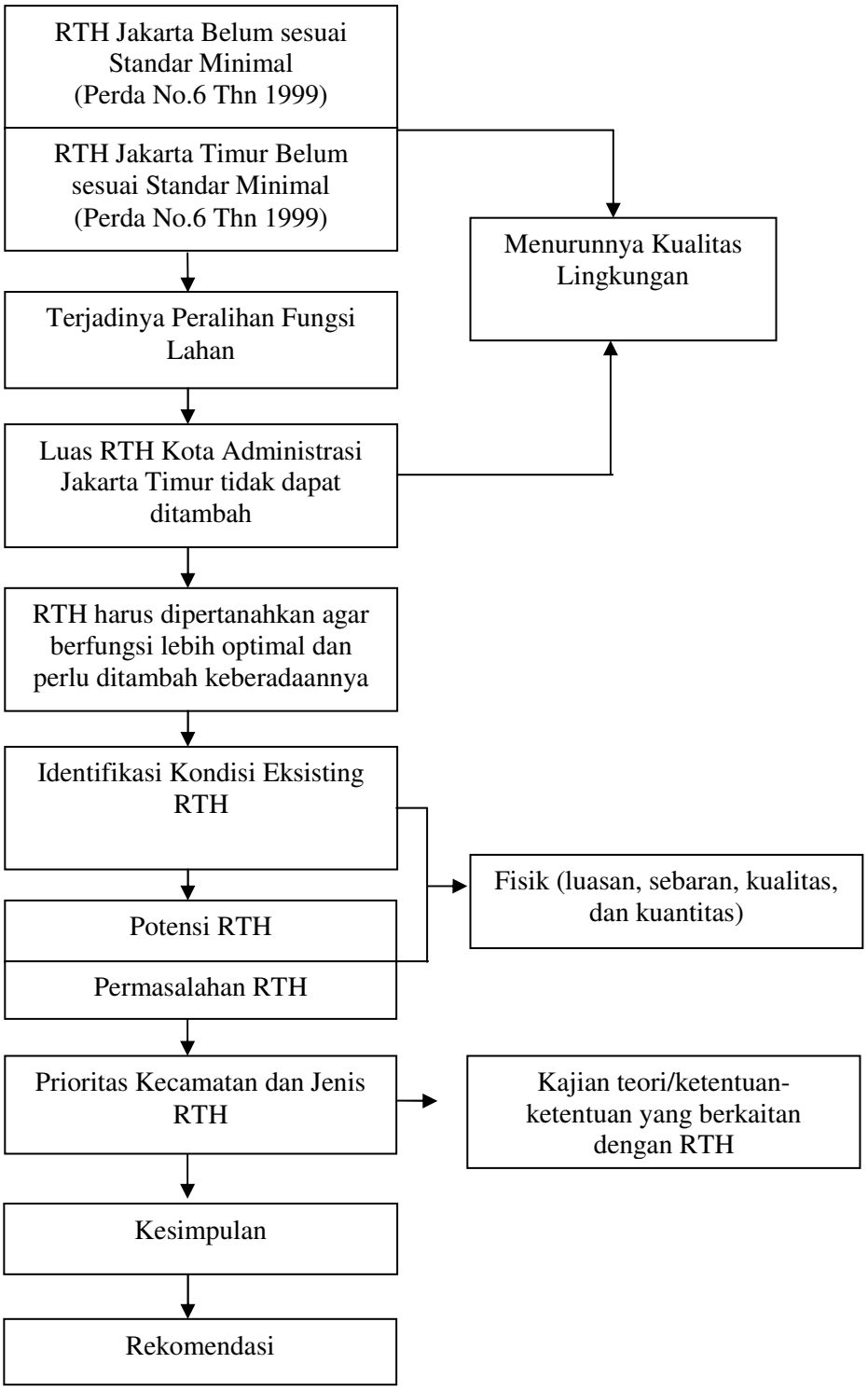
1.5.2 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam studi ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini digunakan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis dan akurat mengenai hasil potensi dan permasalahan RTH di Kota Administrasi Jakarta Timur berdasarkan aspek fisik (luasan, sebaran, kualitas, dan kuantitas).

a. Luasan (luas RTH) ⟶ data sekunder
b. Sebaran (lokasi/letak RTH) ⟶ observasi /data sekunder
c. Kualitas (kondisi baik/buruknya RTH) ⟶ observasi/data sekunder
d. Kuantitas (jumlah RTH) ⟶ data sekunder

Selain hasil potensi dan permasalahan, dilakukan analisis untuk menentukan kecamatan yang menjadi prioritas untuk pengembangan RTH di Kota Administrasi Jakarta Timur. Penentuan kecamatan dilakukan berdasarkan kajian teori penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk. Sedangkan penentuan jenis RTH yang diprioritaskan adalah dengan melihat prioritas pengembangan RTH disetiap kecamatan yang sudah ditentukan oleh pihak-pihak tertentu yang tertuang dalan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah per Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur. Dengan demikian, analisis yang dilakukan adalah dengan menggunakan teori-teori ataupun ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan RTH.

1.6 Kerangka Pemikiran



Gambar 1.2
Bagan Kerangka Pemikiran

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang isi laporan ini, maka sub bab ini menjelaskan tentang sistematika pembahasan, seperti pada uraian dibawah ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara khusus mengenai penyusunan penelitian ini diantaranya mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, sasaran penelitian, ruang lingkup yang terdiri atas lingkup wilayah dan lingkup materi, metodologi penelitian terdiri atas metode pengumpulan data dan metode analisis, kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini secara umum menjelaskan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan RTH. Diantaranya konsepsi RTH (pengertian, tujuan, fungsi, manfaat) yang terkait dengan Ruang Terbuka Hijau, jenis-jenis RTH berdasarkan kebijakan yang ada, standar penyediaan kebutuhan RTH, peraturan perundang-undangan RTH kota serta aspek-aspek yang mendukung identifikasi potensi dan permasalahan RTH.

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum Kota Administrasi Jakarta Timur meliputi fisik dasar, kependudukan, penggunaan lahan. Selain itu juga menjelaskan mengenai gambaran kondisi eksisting RTH Kota Administrasi Jakarta Timur. RTH yang dijelaskan pada bab ini antara lain taman, jalur hijau jalan, tepian air, taman rekreasi, taman olahraga, pertanian, hutan kota, dan taman pemakaman umum.

BAB IV IDENTIFIKASI PRIORITAS KECAMATAN PENGEMBANGAN RTH DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Bab ini menjelaskan mengenai hasil potensi dan permasalahan RTH di Kota Administrasi Jakarta Timur. Identifikasi potensi dan permasalah tersebut didapat berdasarkan kondisi eksisting aspek fisik. Selain itu, dijelaskan juga prioritas kecamatan dan jenis RTH yang dapat dijadikan sebagai pengembangan RTH setiap kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Timur. Prioritas tersebut ditentukan berdasarkan ketentuan penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk.

Sedangkan penentuan jenis RTH dilihat berdasarkan ketentuan peraturan yang sudah ditetapkan untuk pengembangan RTH disetiap kecamatan.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta menghasilkan suatu rekomendasi.